BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern merupakan salah satu krisis terberat dalam sejarah masyarakat Islam. Krisis ini muncul bukan hanya disebabkan oleh suasana melaisme dikalangan umat Islam sendiri, tetapi lebih karena kontak dan perbenturannya dengan kekuatan politik dan militer Eropa yang terus menerus sejak akhir abad XVIII. Dan menjelang tahun 1920-an, seluruh kawasan Islam telah dikuasai oleh berbagai Negara Eropa. Keadaan itu disamping telah menciptakan dis-intregrasi politik kawasan muslim, juga telah menggoncangkan jati diri masyarakat Islam.

Salah satu dampak terbesar dari penetrasi dunia Barat atas dunia Islam, adalah menyangkut konsep dan sistem politik kenegaraan, yang tentu saja konsep tersebut asing dan karenanya a-historis bagi masyarakat muslim pada umumnya. Karenanya beberapa konsep barat seperti : Negara kebangsaan (national state), Nasionalisme , kedaulatan dal lain sebagainya, telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan penguasa Islam.

Perdebatan itu tetap saja menarik, tidak saja karena arti pentingnya Negara dalam konsepsi Islam, tetapi konsepsi negara yang nota-bene berasal dari Barat terse-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

but, telah berpengaruh bahkan telah diperaktekkan di-lingkungan masyarakat muslim. Sementara semenjak awal perkembangan Islam sampai setidak-tidaknya zaman pra-modern, masyarakat Islam hanya mengenal dua konsep teri-torial religius, yakni : dar al-Islam (negara Islam) dan dar al-harb (negara non muslim).

Dalam konsep Islam, negara mempunyai arti dan pe-ran yang sangat penting, bahkan sentral. Negara dalam konsepsi Islam bukan hanya sekedar alat bagi pencapaian kemakmuran, ksejahtraan dan pertahanan, tetapi negara harus pula dapat menjamin berlakunya syari'ah.

Al-Qur'an sebagai sandaran utama perilaku manu - sia muslim, tidak hanya meletakkan prinsip-prinsip moral itas dan etika, melainkan juga memberikan tuntutan dalam bidang sosial, pendidikan ekonomi dan politik berikut ketentuan-ketentuan hukuman untuk kejahatan yang ada. Kesemuanya itu tidak akan da pat dilaksanakan dengan tuntas bila tidak ada satu negara yang akan menegakkan - nya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Taimiyah bahwa da-lam memahami relevansi manuver politik Islam, maka ter-bih dahulu kita bisa mengacu dan memahami beberapa se-trategi nabindalam mendirikan negara Islam dimasa awal kebangkitan Islam. (Imam Taqi ad-Din Ibn Taimiyah, IV: 1969 : 161)

Pembagian dunia kedalam dua kutub yang kelihatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertolak belakang tersebut, dikarenakan oleh karasteristik negara Islam sebagai negara idiologis, artinya bahwa negara Islam itu berlandaskan kepada suatu idiologi (Islam) dan bertujuan untuk menegakkan idiologi tersebut. (Abu A'la al-Maududi, I : 1990 : 166)

Dengan demikian, Islam meletakkan keimanan sebagai simpul utama bagi kesatuan dan persatuan masyarakatnya, suatu masyarakat yang dalam piagam Madinah disebut dengan istilah أمة واحدة , أمة واحدة mengandung makna, bahwa mereka (muhajir dan anshar) disisi Tuhan menjadi umat yang satu, yang dinamakan umat Islam dan disisi masyarakat dunia umumnya mereka adalah warga negara yang satu. (H. Zainal Abidin Ahmad, I : 1977: 158)

Sementara itu, negara-negara moderen saat ini didirikan atas dasar etnisitas, kultur, bahasa serta wilayah. Singkatnya negara moderen itu didirikan diatas konsep nasionalisme, suatu konsep yang berunsurkan :

1 . Kesadaran dan kemauan untuk hidup dalam satu negara tersendiri.
2. Pengalaman, penderitaan, perjuangan dan kemenangan , bersama-sama dimasa lampau, berikut kesediaan untuk berkorban demi masa depan.
3. Terpanggil untuk menjalankan peranan diantara bangsa bangsa.
4. Way of life tersendiri (hidup menurut tradisi, watak, semangat dan kepribadian sendiri. (H. Hoeta oeroek ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I, 1971:133)

Prof. Ernest Renen memberikan catatan, bahwa nasionalisme itu tidak ditentukan oleh ras,agama, bahasa peradaban ataupun ekonomi. Hanya dapat dikatakan bahwa faktor-faktor obyektif tersebut diatas, mungkin merupakanfaktor-faktor kausatif yang menentukan ada atau tidak adanya nasionalisme yang bersifat husus. (F.Isjawara,LLM, VI,1978:126)

Sementara itu, cita-cita nasionalisme untak berjuang mewujudkan perbedaan diantara bangsa-bangsa, yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh, hal itu merupakan cita- cita yang paling kuat.(F.Isjawara, LLM,VI,1978: 126)

Persoalan ini patut untuk kita angkat kembali mengingat konsekwensi logis dari konsep ini adalah pluralisme bangsa dan negara, dengan pandangan hidup, normahukum, norma susila dan pola hubungan antar warga bahkan antar bangsa yang berbeda satu sama lain. Pluralisme bangsa jelas dapat diterima oleh Islam, tetapi pluralisme politik dalam kerangka negara modern perlu kita kaji lebih jauh, jika konsep umah wahidah masih dianggap relefan.

Dan sejauh ini, wujudnyata negara Islam atau Dar-al-Islam yang oleh Azyumardi Azra diistilahkan dengan Relegiosly Based State (negara yang terbentuk atas dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan. (Azyumardy Azra, IV: 1983: 12)

Hal ini penting, karena dalam konsep dar al-Islam dan dar al-Harb terkait beberapa prinsip penerapan syari'ah misalnya : kewarganegaraan, ruang lingkup berlakunya syari'ah, pola hubungan antar bangsa bahkan antar sesama warga negara.

Ketika umat Islam masih memiliki kesatuan politik memegang hegemoni politik, pelaksanaan atribut-atribut , diatas dapat dijalankan dengan sempurna, dan kita dapat melihat dengan jelas batas-batas dan warnanya.

Namun ketika kesatuan dan hegemoni tersebut hilang, umat Islam tidak mampu lagi berbuat banyak ketika saudara-saudaranya dibantai dalam perang bosnia, mereka ya ng mengalami penderitaan karena kemiskinan dan kebodohan dan yang diprrlakukan secara diskriminatif ketika hendak menampakkan jati dirinya, sementara Islam dengan jelas mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara.

Adalah satu kenyataan bahwa saat ini umat Islam hidup dan berada dala m berbagai negara, dengan identitas dan aliran politik masing-masing, serta tunduk di bawa konvensi-konvensi internasional sehingga konsep hijrah menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena terbatasi oleh aturan-aturan hukum internasional yang membatasi adanya migrasi besar-besaran, disamping tiap-tiap negara tersebut memiliki persoalan dan kebijakan sendiri-sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, adanya suatu wilayah bagi kesatu an politik ummat Islam dirasakan sebagai kebutuhan, karena komunitas Islam diharapkan menjadi cahaya (taula - dan) bagi ummat manusia, sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya:

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

"Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk - manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah". (Depag RI., 19 71: 94)

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah di a tas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah sistem dar al-Islam dan dar al-Harb serta aplikasinya.

Akan tetapi supaya masalah ini lebih jelas dan terarah, perlu adanya pengkaitan dengan sistem percatur an negara modern. Oleh karena itu, dalam masalah ini da pat dirumuskan dar al-Islam dan dar al-Harb serta aplikasinya dalam tata politik negara modern.

C. Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan dan penulisan skripsi ter - arah dan ruang lingkupnya tidak timbul kekeliruan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan nanti, setelah penulis mendekati pada tujuan dan maksud, maka perlu membuat batasan-batasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- Dari segi obyek : Yaitu semua buku-buku yang ada pang kal masalahnya dengan pokok bahasan skripsi ini, yaitu dar al-Islam dan dar al-Harb serta aplikasinya dalam tata politik negara modern.
- Dari segi waktu : Selama tahun 1995

Dengan pembatasa n demikian, maka rumusan masalah nya menjadi tentang dar al-Islam dan dar al-Harb serta aplikasinya dalam tata politik negara modern pada tahun 1995.

D..Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, terdapat dua permasalahan yang layak untuk dikaji lebih jauh, yaitu :

1. Dikaitkan dengan perkembangan tata kenegaraan dewasa ini, bagaimanakah konsep dar al-Islam dan dar al-Harb tersebut diposisikan.
2. Dalam kontek negara modern seperti saat ini, bagaimanakah atribut-atribut yang berkaitan dengan konsepsi dar al-Islam dam dar al-Harb dapat dimanifestasikan , misalnya konsep tentang kewarganegaraan dan pelaksana an ketentuan-ketentuan syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penyusunan

a. Dari segi teoritis

1. Untuk mengetahui perkembangan konsepsi dar al - Islam dan da r al-Harb dalam khazanah intelek - tual Islam, kaitanya dengan pelaksanaan syari'- ah Islam.

2. Mencari alternatif bagi kemungkinan penerapannya dalam kasus negara modern atau negara kebangsa a dewasa ini.

b. Dari segi praktis

Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu syari'ah, pada IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan Penyusunan

a. Kegunaan yang bersifat ilmiyah, yakni untuk menambah wacana pengetahuan disekitar masalah politik Islam, yang diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu kesyari'ahan.

b. Diharapkan dapat menjadi tambahan perbendaharan ke ilmuan syari'ah bidang siyasah, untuk penulisan dan kjian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Telaah Pustaka

Menurut hemat kami, tidak ada agama di dunia ini yang melebihi Islam, dalam hubungannya dengan bidang politik, sehingga terjadi persatuan antara agama dengan politik. Hubungan erat antara agama dan politik bahkan - telah menjadi satu ciri dari sejarah perkembangan Islam.

Kalau kita menyimak aktifitas na bi diketika beliau menyusun tata aturan bagi pola hubungan anta ra komunitas Islam dan komunitas non muslim (Piagam Madinah) dimana bila tata aturan tersebut kita bandingkan dengan ukuran-ukuran politik masa ini, dapatlah kita katakan bahwa aturan tersebut adalah tata aturan politik.

Dalam wacana politik Islam, pembicaraan politik - selalu saja mengacu kepada persoalan imamah atau imam dimana imam merupakan satu pilar dari tiga komponen kekuatan bagi tegaknya kekuasaan Isla m. Sedang dua komponen lainnya adalah syari'ah dan bangsa.

Adapun makna hakiki dari imamah adalah : Pemerintahan Islam yang mempunya i undang-undang, atau dengan kata lain adalah pmerintahan yang undang-undang dasarnya adalah syari'at Islam. (Prof.TM. Hasby Ash-Shiddiqy, I : 1971: 49)

Reorientasi makna tersebut dapat kita pahami, mengingat syari'at Islam adalah Syari'at paripurna yang isinya meliputi semua sisi kehidupan manusia. Lebih dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bila kita memeriksa sejatah para Nabi-Nabi, maka nam pa klah bahwa hanya ada dua Rasul (Isa dan Muhammad)yang memiliki peran ganda, yakni membawa agama dan sekaligus diperintahkan untuk melakukan jihad, menegakkan suatu negara yang akan melindungi syarai'at agama yang dibawanya

Berangkat dari kerangka besar inilah seluruh golongan Mu'tazilah (kecuali beberapa orang), Khowarij (sela in golongan Najdah) dan golongan Syi'ah sepakat bahwa menegakkan imamah itu wajib.Mereka mengajukan beberapa alasan untuk mendukung pernyataanya, diantara alasan itu diantaranya :

1. Ijma'ul Ummah, seluruh umat sepakat bulat bahwa adanya kepala negara adalah sala satu hal yang sangat perlu meskipun mereka berbeda pendapat tentang siapa-yang akan dibaiat da lam peristiwa setelah wafatnya Rasul.
2. Untuk menolak bencana-bencana yang ditimbulkan oleh kacau balaunya keadaan.
3. Melaksanakan tugas-tugas keagamaan.
4. Untuk mewujutka n keadilan yang sempurna.(Hasby Ash-Siddieqy,I,1971:49)

Akhirnya dengan bertitik tolak dari arti penting-negara dan dengan mempertimbangkan syari'at islam yang bersifat Universal, maka para fuqoha' membagi dunia menjadi dua katagori yaitu:

1. Yang melingkupi segala negara islam, yang dinamakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dar al- Islam.

2. Yang melingkupi segala negara-negara selain islam, yang dinamakan dar al- Harb. (Hasby Ash Siddiqei, I, 1970 : 16)

Disamping kedua istilah tersebut, dalam fiqh siyasah dikenal pula negara-negara yang masuk dalam katagori Ahd dan Amn, yaitu negara yang mempunyai hubungan dengan negara Islam karena adanya suatu perjanjian keamanan dan kewajiban timbal balik, atau karena suatu perjanjian keamanan biasa. (Abdul Hamed Sulayman, 1989: 8)

Adapun negara-negara yang masuk dalam katagori dar al- Islam adalah negara-negara yang didalamnya terdapat segala hukum islam, atau penduduknya yang muslim dapat melaksan akan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Sedangkan yang masuk dalam katagori dar Al-harb, adalah segalah negeri yang bukan islam atau negara yang tidak memakai hukum islam. (Hasby Ash Siddiqey, I, 1970: 17)

Oleh karenanya, maka penduduk dar al-Islam dipandang sebagai satu bangsa baik yang diperintah satu pemerintahan atau oleh beberapa pemerintahan dan begitu pula sebaliknya dengan penduduk dar al- harb. Berdasarkan hal itu pula lah, warga negara dar al-Islam dibedakan dalam katagori muslim dan dhimmi, sementara warga dar-al harb dibedakan katagori harbiyun dan orang-orang yang beragama Islam. (Abd. al-Karim Zaidan , tt :13)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan sekarang, sebagaiman yang di ungkapkan oleh Maulanah Muhammad Ali, yang dikutip oleh Akhmad-Minhaji, bahwa istilah dar Al-Islam dan dar al-harb tidak pernah digunakan baik oleh Al-qur'an maupun hadits Nabi. (Akhmad Minhaji, V: 1994 : 25)

Memang benar bahwa istilah dar al-harb digunakan - dalam shohih al Bukhori, tetapinhal itu hanya sebagai judul dalam salah satu pasalnya. Dalam bab tersebut terdapat dua hadits ya ng masing-masing membicarakan kota Mek kak dan Rabhah, sementa ra masyarakat islam dalam keadaan perang dengan masyarakat setempat.

Tetapi sayangnya tegas Muhammad Ali, istilah tersebut kemudian digunakan oleh para juris Islam(fuqoha) untuk menyebut negara-negara yang tidak berada dibawah pemerintahan Islam, walaupun sebenarnya mereka tidak dalam keada an perang . Pada akhirnya negara-negara islam , selalu dihadapkan pada posisi perang dengan negara-negara non muslim. Dan bila posisi ini tetap dipertahankan maka umat islam akan sem akan sulit untuk menerapkan ide- ide nya.

Menyimak persoalan ini, barangkali benar pendapat: Tdendeh, Bahwa masalah kedudukan minoritas non muslim dan dalam soal gender, perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada diskriminasi sangat menonjol dalam hukum islam. (Akh Minhaji, V: 1994 : 20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian menyangkut pembentukan satu komunitas politik muslim dan sampai pada tahab tertentu mendirikan negara Islam, demi kelangsungan penerapan syari'at Islam maka pembagian dunia kedalam dua kategori di atas, pada ahirnya dapat dipandang melanggar pondasi hukum internasional dan sekaligus mengganggu sistem hubungan antar negara. Dalam posisi tertentu, ia juga akan menyulitkan umat Islam untuk menegakkan norma-norma dalam menghadapi perlawanan dunia luar kendatipun umat Islam berjumlah mayoritas.

Menurut kaidah hukum internasional, pembentukan negara baru haruslah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, batas-batas wilayahnyaharus jelas dan dapat dijamin oleh konvesi internasional dari gangguan perbatasan dan kelangsungan hidup pemerintahannya juga bergantung kepada kerja sama ekonomi dan politik yang aktif dari komunitas dunia yang berpengaruh.

Lebih dari itu, saat ini agma tidak lagi menjadi faktor utama dan menentukan dalam percaturan negara modern. Persatuan dan kerja sama negara modern, lebih banyak di dasarkan kepada kepentingan negara modern, lebih banyak didasarkan kepada kepentingan ekonomi sosial budaya, pertahanan badan ilmu pengetahuan, baik dalam sekala regional maupun internasional.

Dan sedemikian jauh, gagasan bahwa konsekwensi aja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ran Marx tentang : Historis materialisme : yang berujung pada hilangnya negara-negara di dunia, ternyata juga tidak benar. Negara-negara tetap ada, dan para negarawan - menolak sifat PBB sebagai super state, dan tetap menghendaki kedaulatan tiap-tiap negara merdeka.(Wiryono Projodikoro,II,1971:126)

G. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain :

1. Pengumpula n data

   Metode pengumpulan data dalam usaha pembahasan skripsi ini, kami lakukan dengan mengadakan penelitian pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan pokok masalah.

2. Analisa data

   Untuk menganalisa data-data yang diperoleh, penyusun akan menggunakan metode-metode berikut ini:

   a. Metode induktif

      Metode ini dipakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan.

   b. Metode Deduktif

      Metode ini digunakan untuk menguraikan data-data - yang bersifat umum, sehingga diperoleh suatu pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngertian yang bersifat husus.

c. Metode komperatif

Metode ini dipakai untuk menganalisa data-data yang berbeda, dengan jalan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih kuat atau untuk mengkomparasikannya.

H. Sistematika pembahasan

Untuk lebih mudah dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka skripsi ini kami susun dengan urutan-sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari tulisan-ini, juga akan kami uraikan mengenai latar belakang masalah, pokok-pokok permasalahannya, tujuan dan kegunaan , telaah pustaka berikut kerangka teoritiknya, dan sestematika pembahasan.

Bab kedua, membicarakan tentang persoalan-persoal an yang berkaitan dengan konsep negara modern, yang meliputi : Pengertian, syarat-syarat, dasar dan tujuan negara modern, bangunan tata hukumnya dan pola hubungan diantara negara-negara modern dewasa ini.

Bab ketiga, berisi tinjauan secara umum atas keberadaan konsep dar al-Islam dan dar al-Harb, yang meliputi kajian tentang pengertiannya, dasar hukum, sejarah perkembangan konsep tersebut berikut pola penerapannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi analisa akan kemungkinan penerapan konsep dar al-Islam dan dar al-Harb dalam kasus negara modern saat ini, yang berisi analisa konsepsional dan analisa kemungkinan-kemungkinan penerapannya dalam kontek negara modern.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id